

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian yang sangat pesat merupakan proses perubahan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang tidak perlu kontraprestasi secara langsung mempunyai prospek yang sangat mungkin untuk menjadi sumber utama penerimaan negara yang dapat diandalkan, karena Pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang atau pinjaman luar negeri atau penerimaan pada sektor migas yang semakin menurun.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar secara terus menerus dan dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan. Salah satu kebijakan perpajakan yang telah dilakukan Pemerintah adalah program penurunan tarif pajak pada PP 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang adanya penurunan tarif pajak untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1 berikut :

Tabel 1
Tarif PPh UMKM

Mulai berlaku 1 Juli 2013 sampai dengan 1 Juli 2018 PP 46 Tahun 2013	Tarif	Mulai berlaku 1 Juli 2018 sampai dengan saat ini PP 23 Tahun 2016	Tarif
< Rp 4.800.000.000	1%	< Rp 4.800.000.000	0.5%

Sumber : Diolah oleh peneliti



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1
Tarif Pajak UMKM Turun Tarif

Alasan dibuatnya kebijakan penurunan tarif PPh UMKM adalah untuk memberikan keringanan pajak bagi UMKM dengan potongan pajak 0,5%, penurunan tarif diharapkan dapat menstimulasi munculnya UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang untuk kesempatan berusaha dengan berkurangnya beban biaya pajak UMKM sehingga potongan tersebut dapat digunakan dalam mengembangkan usaha menurut Sari (2018).

Analisis yang dilakukan oleh Sari (2018) menjelaskan bahwa jumlah UMKM Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 60 juta pelaku usaha, baru $\pm 2,3\%$ (1,4 juta pelaku usaha) terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun yang sama, yang terdiri dari 205.000 WP UMKM badan usaha dan 1.268.000 WP UMKM perseorangan. Dari data tersebut masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan hal ini menjadi sorotan potensi pajak baru bagi pemerintah.

Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan jumlah wajib pajak UMKM sebesar $\pm 40\%$ yaitu sejumlah 400 ribu pelaku usaha. Adapun 1 juta pelaku UMKM tercatat pada tahun 2016. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan yang sama, diharapkan wajib pajak UMKM pada akhir tahun 2018 dapat tumbuh menjadi 1,96 juta pelaku usaha. Adanya kebijakan insentif pajak UMKM menjadi peluang bagi pemerintah untuk memunculkan lebih banyak wajib pajak UMKM baru yang dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak nonmigas. Namun dilihat dari skala usaha UMKM, potensi wajib pajak baru yang dapat menjadi sasaran kebijakan ini lebih berfokus pada kelompok pelaku usaha kecil sejumlah 681.522 pelaku usaha (1,15%) dan pelaku usaha menengah mencapai 60 ribu pelaku usaha (0,1%). Kedua kelompok usaha ini yang (lebih siap) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, dibandingkan pelaku usaha mikro.

Selain itu, dampak jangka pendek dari implementasi kebijakan insentif ini yakni akan terjadi penurunan penerimaan negara khususnya penerimaan pajak nonmigas pada semester kedua tahun 2018. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, total penurunan penerimaan negara diperkirakan sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun selama masa Juli hingga Desember 2018. Adapun penerimaan pajak dari PPh final UMKM tercatat sebesar \pm Rp 5,7 triliun pada tahun 2017. Kontribusi pajak UMKM bersumber dari wajib pajak UMKM orang pribadi sebesar \pm Rp3,2 triliun dan dari wajib pajak UMKM badan sebesar \pm Rp2,5 triliun.

Namun untuk jangka menengah, kebijakan ini akan memperluas basis pajak dan meningkatkan tax ratio dengan bertambahnya jumlah wajib pajak UMKM. Diantara jenis penerimaan pajak nonmigas, kontribusi pajak dari UMKM masih rendah. Pada tahun 2017, kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKMnya (2,2%) terhadap total penerimaan, lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak penghasilan usaha besar. Meskipun demikian, pertumbuhan penerimaan pajak dari UMKM periode tahun 2013 hingga sekarang bersifat positif. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan dapat dipastikan adanya perkembangan yang sehat pada sektor ini.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 2
UMKM Tulang Punggung Perekonomian

Berdasarkan penjelasan di atas, besar harapan dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam sektor UMKM dengan cara menurunkan tarif PPh final (UMKM) yang semula memiliki tarif (1%) menjadi (0,5%) dari peredaran bruto, membuat peneliti tertarik untuk melihat apakah penerapan kebijakan pemerintah tersebut diikuti dengan peningkatan pendapatan pajak,

pertumbuhan UMKM dan kepatuhan wajib pajak. Atas dasar uraian tersebut maka peneliti menjadikannya sebagai tugas akhir dengan judul **“Analisis Pengaruh Penurunan Tarif UMKM (PP 23 Tahun 2018) Terhadap Tingkat Pertumbuhan UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal”**

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa banyak WP yang memanfaatkan PP No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak terhadap tingkat pertumbuhan UMKM, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 atas penurunan tarif pajak final. Serta dapat menganalisis pengaruh peraturan pemerintah tersebut terhadap tingkat pertumbuhan UMKM, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai saran atau masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam meregulasi peraturan sehingga tetap dapat meningkatkan minat wajib pajak khususnya UMKM dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan dan pertumbuhan UMKM yang optimal bagi pembangunan nasional.

3. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 atas penurunan tarif pajak final. Serta dapat menganalisis pengaruh peraturan pemerintah tersebut terhadap tingkat pertumbuhan UMKM, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi mahasiswa maupun staf pengajar STIESIA Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan mengharuskan peneliti untuk membatasi konteks yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian tugas akhir yang akan diambil yaitu tentang pengaruh penurunan tarif UMKM (PP 23 Tahun 2018) terhadap tingkat pertumbuhan UMKM, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal dalam periode tahun pajak 2018.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data dalam penelitian Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah proses pengumpulan informasi ilmiah, berupa metode, teori-teori, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, naskah, jurnal, rekaman sejarah, catatan, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang terdapat di perpustakaan (Prastowo, 2012:81).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data dengan dokumentasi bukti dari data tingkat pertumbuhan UMKM, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada Seksi Pengelola Data dan Informasi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dalam periode tahun pajak 2018 sehingga bermanfaat sebagai dasar pengujian data.

1.5.2 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian Tugas Akhir ini, yaitu dengan menganalisis semua data yang telah terkumpul dan mendeskripsikan atau menggambarkan data tersebut dalam bentuk grafik atau tabel agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka

untuk mencandarkan karakteristik kelompok atau individu menurut Syamsudin & Damiyanti (2011).

